

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN 2023**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

**Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711198809 1 001

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL ..................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................... iv

DAFTAR TABEL ..................................................................... v

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Gambaran Umum Organisasi ......................................... 1
  2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi ............... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

* 1. Rencana Strategis .................................................... 15
  2. Program dan Kegiatan ................................................. 16
  3. Perjanjian Kinerja .................................................... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

* 1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 26s
  2. Realisasi Anggaran ..................................................... 39

BAB IV PENUTUP

* 1. Kesimpulan ............................................................. 47
  2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja ..................... 47

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan   
 Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun   
 2023

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,   
 dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023

Tabel 3.1.1.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;

Tabel 3.1.1.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun   
 2023;

Tabel 3.1.1.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan   
 akhir Periode Renstra;

Tabel 3.1.1.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;

Tabel 3.1.1.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;

Tabel 3.1.1.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;

Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;

Tabel 3.1.1.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan   
 / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.1.1.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /   
 Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.1.2.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;

Tabel 3.1.2.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun   
 2023;

Tabel 3.1.2.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan   
 akhir Periode Renstra;

Tabel 3.1.2.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;

Tabel 3.1.2.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;

Tabel 3.1.2.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;

Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;

Tabel 3.1.2.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/   
 Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.1.2.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /   
 Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.1.3.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;

Tabel 3.1.3.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun   
 2023;

Tabel 3.1.3.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan   
 akhir Periode Renstra;

Tabel 3.1.3.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;

Tabel 3.1.3.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;

Tabel 3.1.3.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;

Tabel 3.1.3.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;

Tabel 3.1.3.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/   
 Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.1.3.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/   
 Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan   
 Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90 %. Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp 15.847.399.455,- yang dilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2023 adalah Rp 13.279.691.803,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 83,80 %.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Gambaran Umum Organisasi**
     1. **Sejarah Organisasi**

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 47 Tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 12 kali, yaitu :

* Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
* Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
* Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
* Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
* Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
* Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
* Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
* Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
* Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
* Tahun 2013 – 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
* Tahun 2015 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
* Tahun 2017 – 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, M.M.
* Tahun 2020 – 2021 dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.
* Tahun 2020 – Sekarang dipimpin oleh Bapak Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.

Selama 47 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

* + 1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 03 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
2. Perumusan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
6. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
   * 1. Kepala Dinas;
     2. Sekretariat, terdiri atas :
     3. subbagian tata usaha; dan
     4. kelompok jabatan fungsional.
     5. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, tediri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
     6. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
     7. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
     8. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
     9. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Sekretariat
9. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan dan mempunyai fungsi:
   * + 1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
       2. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi; ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
       3. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
       4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
       5. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
       6. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
       7. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
       8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan dinas;
       9. Pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas;
       10. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
       11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
       12. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
11. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan subbagian tata usaha;
12. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada subbagian tata usaha;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
14. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
15. Melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
16. Mengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada dinas;
17. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja dinas;
18. Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
19. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
20. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
21. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
22. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan subbagian tata usaha;
    * + 1. Menyusun laporan pelaksanaan;
23. Bidang Rehabilitasi, Pelindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputI rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA)

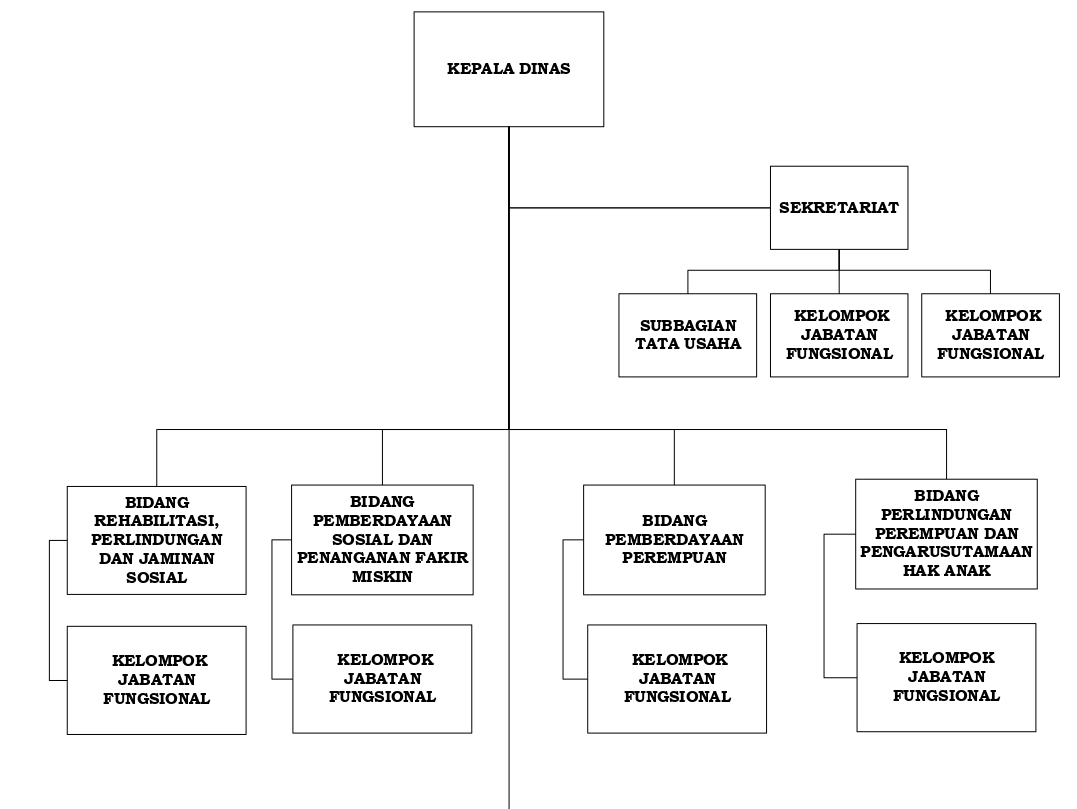
UPTD merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskirimasi, perlindungan khusus masalah lainnya.

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA mempunyai fungsi :

1. Penyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksana kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
2. Pelaksana program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
3. Pengaduan masyarakat;
4. Penjangkauan korban;
5. Pengelolaan kasus;
6. Penampungan sementara;
7. Mediasi;
8. Pendampingan korban.

**Bagan Struktur Organisasi**

**Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**(UPTD PPA)**

* + 1. **Sumber Daya Organisasi**

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2022 terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) pegawai terdiri dari:

* 1. 8 (Lima) orang pejabat struktural;
  2. 1 (satu) orang pejabat fungsional perencana ahli muda;
  3. 4 (empat) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama;
  4. 2 (dua) orang pejabat fungsional analis kebijakan ahli muda;
  5. 5 (lima) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli muda;
  6. 1 (satu) orang pejabat fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda;
  7. 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis Terampil; dan
  8. 18 (delapan belas) orang staf.
     1. **Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
3. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
   1. **Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi**

Pada Tahun 2023 inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 2,61%. Hal ini merupakan inflasi terendah selama 20 tahun terakhir. Tapi hal ini tidak menjadi acuan terhadap tingkat ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya. Hal ini dikarenakan:

* + 1. Kenaikan harga kelompok bahan pangan;
    2. Kenaikan harga BBM Non Subsidi. Walaupun untuk kendaraan angkutan barang pemerintah menyediakan BBM ber Subsidi, tetapi dikarenakan beberapa faktor yang terkadang menyebabkan BBM ber Subsidi tidak tersedia di SPBU. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan komoditas sehingga harga barang melambung tinggi;
    3. Badai El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang di seluruh Indonesia. Sehingga terjadinya beberapa tanaman yang gagal panen dan menyebabkan harga menjulang tinggi dan daya beli masyarakat menurun.

Sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempauan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo salah satu dari perangkat daerah yang harus ikut serta dalam penanganan dampak inflasi terhadap PMKS yang ada di Kota Probolinggo.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas;
2. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;
3. Masih tingginya kasus terhadap anak dan perempuan dengan terdapat 55 Kasus yang mengadu pada UPTD PPPA pada tahun ini. Meskipun mengalami peningatakan dari kasus pada tahun 2023 yaitu terdapat 46 Kasus.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat;
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender.

Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak;
   1. **Program dan Kegiatan**

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Program dan Kegiatan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kota Probolinggo Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN** | | | | | | | | | | | | **PAGU ANGGARAN (P.APBD)** | **REALISASI** | **%** |
| **URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | **14.748.713.575** | **12.295.320.293** | 83,37% |
|  | |  | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | | **6.178.399.396** | **5.723.659.308** | **92,64%** |
|  | |  | | |  | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **54.435.590** | **54.245.880** | **99,65%** |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.365.000 | 4.364.800 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.070.590 | 49.881.080 | 99,62% |
|  | |  | | |  | | | **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | | | | **5.172.743.886** | **4.748.818.575** | **91,80%** |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.009.870.706 | 4.587.713.895 | 91,57% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 93.492.000 | 92.592.000 | 99,04% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 69.381.180 | 68.512.680 | 98,75% |
|  | |  | | |  | | | **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | | | | **1.129.800** | **1.109.800** | 98,23% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.129.800 | 1.109.800 | 98,23% |
|  | |  | | |  | | | **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH** | | | | **213.150.010** | **212.819.635** | 99,85% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 213.150.010 | 212.819.635 | 99,85% |
|  | |  | | |  | | | **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | | | | **270.729.910** | **260.831.012** | 96,34% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.847.250 | 29.610.100 | 99,21% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.031.800 | 9.031.500 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.215.000 | 8.215.000 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.998.000 | 1.950.000 | 97,60% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 163.527.860 | 159.382.200 | 97,46% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 48.110.000 | 42.642.212 | 88,63% |
|  | |  | | |  | | | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | | **41.519.000** | **40.060.000** | 96,49% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.519.000 | 40.060.000 | 96,49% |
|  | |  | | |  | | | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | **142.464.030** | **137.567.941** | 96,56% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.854.030 | 2.851.000 | 99,89% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103.280.000 | 100.886.941 | 97,68% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.330.000 | 21.830.000 | 89,72% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | **282.227.170** | **268.206.465** | 95,03% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.789.200 | 32.066.064 | 94,90% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 127.794.970 | 116.310.801 | 91,01% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pemeliharaan Mebel | 6.900.000 | 6.900.000 | 100,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 48.725.000 | 48.575.000 | 99,69% |
|  | |  | | |  | | |  | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 65.018.000 | 64.354.600 | 98,98% |
|  | |  | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | 77.716.590 | 76.800.180 | 98,82% |
|  | |  | | |  | | | **PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | 77.716.590 | 76.800.180 | 98,82% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota** | 7.921.000 | 7.715.100 | 97,40% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota** | 64.895.590 | 64.730.080 | 99,74% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota** | 3.400.000 | 2.855.000 | 83,97% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)** | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% |
|  | |  | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | 935.125.180 | 885.422.865 | 94,68% |
|  | |  | | |  | | | **REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL** | | | | 823.275.590 | 776.568.200 | 94,33% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Penyediaan Permakanan** | 763.033.590 | 717.253.700 | 94,00% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Penyediaan Alat Bantu** | 60.242.000 | 59.314.500 | 98,46% |
|  | |  | | |  | | | **REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV / AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL** | | | | 111.849.590 | 108.854.665 | 97,32% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Penyediaan Permakanan** | 21.800.000 | 21.477.800 | 98,52% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Penyediaan Sandang** | 90.049.590 | 87.376.865 | 97,03% |
|  | |  | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL** | | | | | | | 7.258.495.319 | 5.322.704.210 | 73,33% |
|  | |  | | |  | | | **PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | 7.258.495.319 | 5.322.704.210 | 73,33% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota** | 322.244.780 | 321.790.360 | 99,86% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** | 6.860.469.049 | 4.925.303.870 | 71,79% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat** | 75.781.490 | 75.609.980 | 99,77% |
|  | |  | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | 201.900.000 | 191.355.250 | 94,78% |
|  | |  | | |  | | | **PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN / KOTA** | | | | 201.900.000 | 191.355.250 | 94,78% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana** | 201.900.000 | 191.355.250 | 94,78% |
|  | |  | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | | 97.077.090 | 95.378.480 | 98,25% |
|  | |  | | |  | | | **PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONALKABUPATEN / KOTA** | | | | 97.077.090 | 95.378.480 | 98,25% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota** | 15.000.000 | 14.934.000 | 99,56% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota** | 13.096.000 | 11.618.000 | 88,71% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota** | 68.981.090 | 68.826.480 | 99,78% |
| **URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | **1.097.285.880** | **983.003.960** | **89,59%** |
|  | |  | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | 331.107.290 | 317.397.280 | 95,86% |
|  | |  | | |  | | | **PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA** | | | | 45.620.000 | 42.168.500 | 92,43% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota** | 29.157.500 | 25.857.500 | 88,68% |
|  | |  | | |  | | |  | | | **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG** | 16.462.500 | 16.311.000 | 99,08% |
|  | |  | | |  | | | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA** | | | | 285.487.290 | 275.228.780 | 96,41% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi** | | 17.890.000 | 17.840.000 | 99,72% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi** | | 267.597.290 | 257.388.780 | 96,19% |
|  |  | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | 192.165.000 | 127.295.900 | 66,24% |
|  |  | | |  | | | **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | 51.500.000 | 47.550.000 | 92,33% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota** | | 51.500.000 | 47.550.000 | 92,33% |
|  |  | | |  | | | **PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA** | | | | | 121.515.000 | 60.700.000 | 49,95% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota** | | 24.000.000 | 24.000.000 | 100,00% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota** | | 97.515.000 | 36.700.000 | 37,64% |
|  |  | | |  | | | **PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | 19.150.000 | 19.045.900 | 99,46% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota** | | 19.150.000 | 19.045.900 | 99,46% |
|  |  | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK** | | | | | | | | 250.000 | 250.000 | 100,00% |
|  |  | | |  | | | **PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | 250.000 | 250.000 | 100,00% |
|  |  | | |  | | |  | | | **Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota** | | 250.000 | 250.000 | 100,00% |
|  |  | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | | | 263.533.590 | 256.856.280 | 97,47% |
|  |  | |  | | | **PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 95.636.000 | 91.982.450 | 96,18% |
|  |  | |  | | |  | | | **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | 18.850.000 | 17.850.000 | 94,69% |
|  |  | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | 76.786.000 | 74.132.450 | 96,54% |
|  |  | |  | | | **PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 167.897.590 | 164.873.830 | 98,20% |
|  |  | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | | 27.500.000 | 27.400.000 | 99,64% |
|  |  | |  | | |  | | | **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | | 87.012.000 | 85.694.750 | 98,49% |
|  |  | |  | | |  | | | **Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | | 53.385.590 | 51.779.080 | 96,99% |
|  |  | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | | 310.230.000 | 281.204.500 | 90,64% |
|  |  | |  | | | **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 58.200.000 | 55.295.000 | 95,01% |
|  |  | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | 58.200.000 | 55.295.000 | 95,01% |
|  |  | |  | | | **PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 177.434.000 | 154.629.500 | 87,15% |
|  |  | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | 156.989.000 | 134.394.500 | 85,61% |
|  |  | |  | | |  | | | **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | 20.445.000 | 20.235.000 | 98,97% |
|  |  | |  | | | **PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 74.596.000 | 71.280.000 | 95,55% |
|  |  | |  | | |  | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | | 74.596.000 | 71.280.000 | 95,55% |
|  | **URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | **1.400.000** | **1.367.550** | **97,68%** |
|  |  | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | | 1.400.000 | 1.367.550 | 97,68% |
|  |  | |  | | | **PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | 1.400.000 | 1.367.550 | 97,68% |
|  |  | |  | | |  | | | **Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat** | | | 1.400.000 | 1.367.550 | 97,68% |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | 15.847.399.455 | 13.279.691.803 | 83,80% |

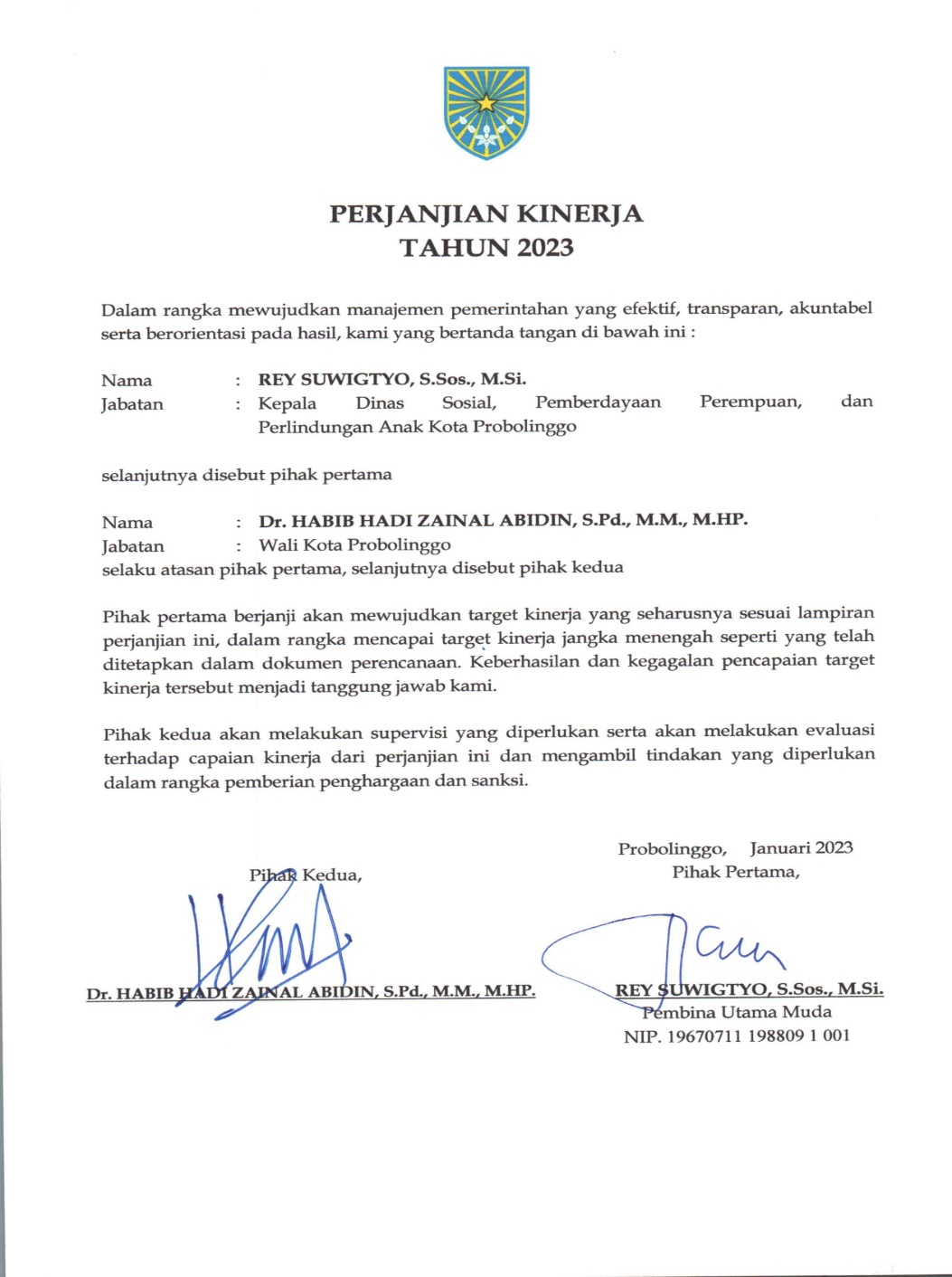
* 1. **Perjanjian Kinerja**

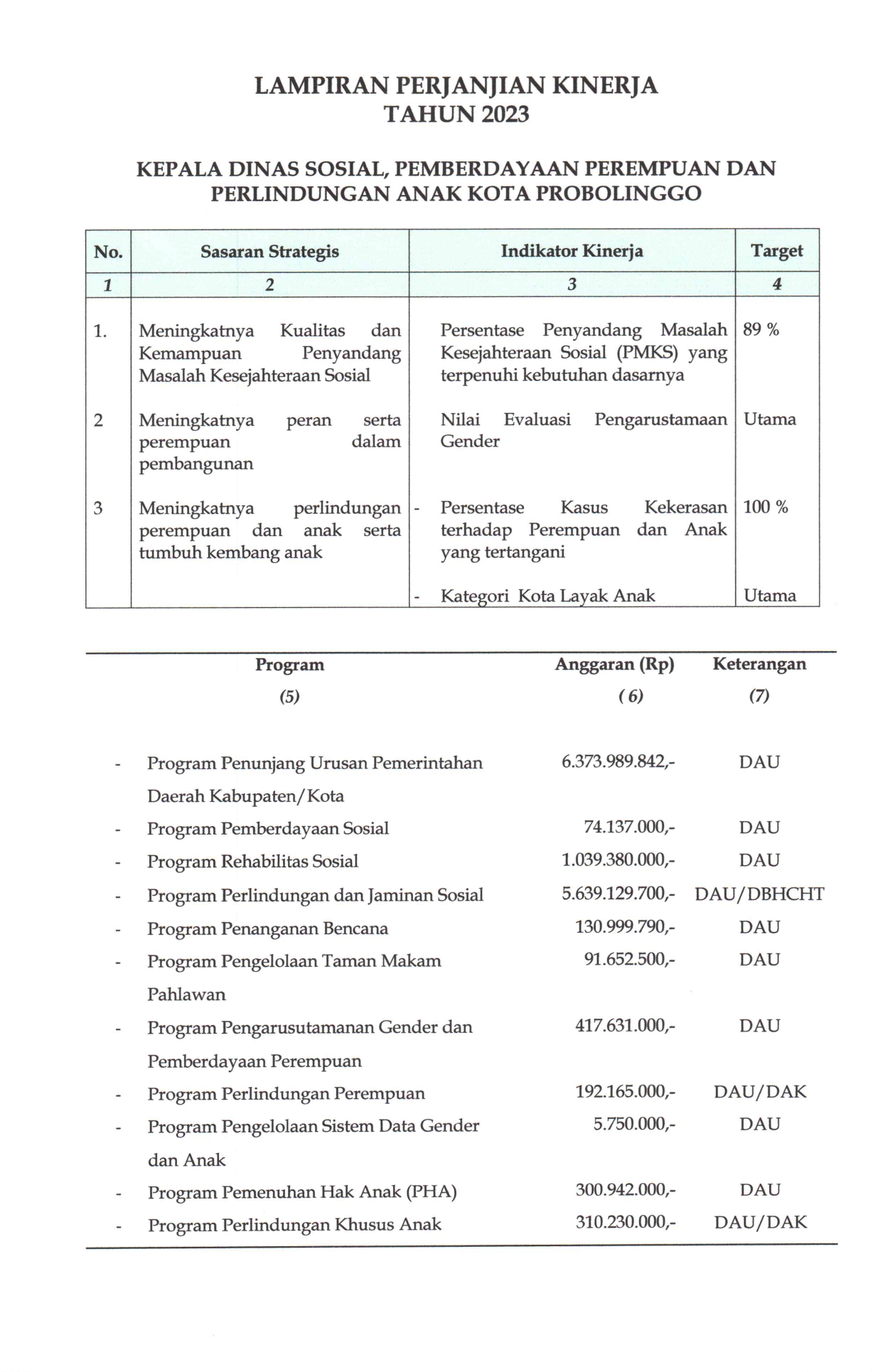
Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022 , Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

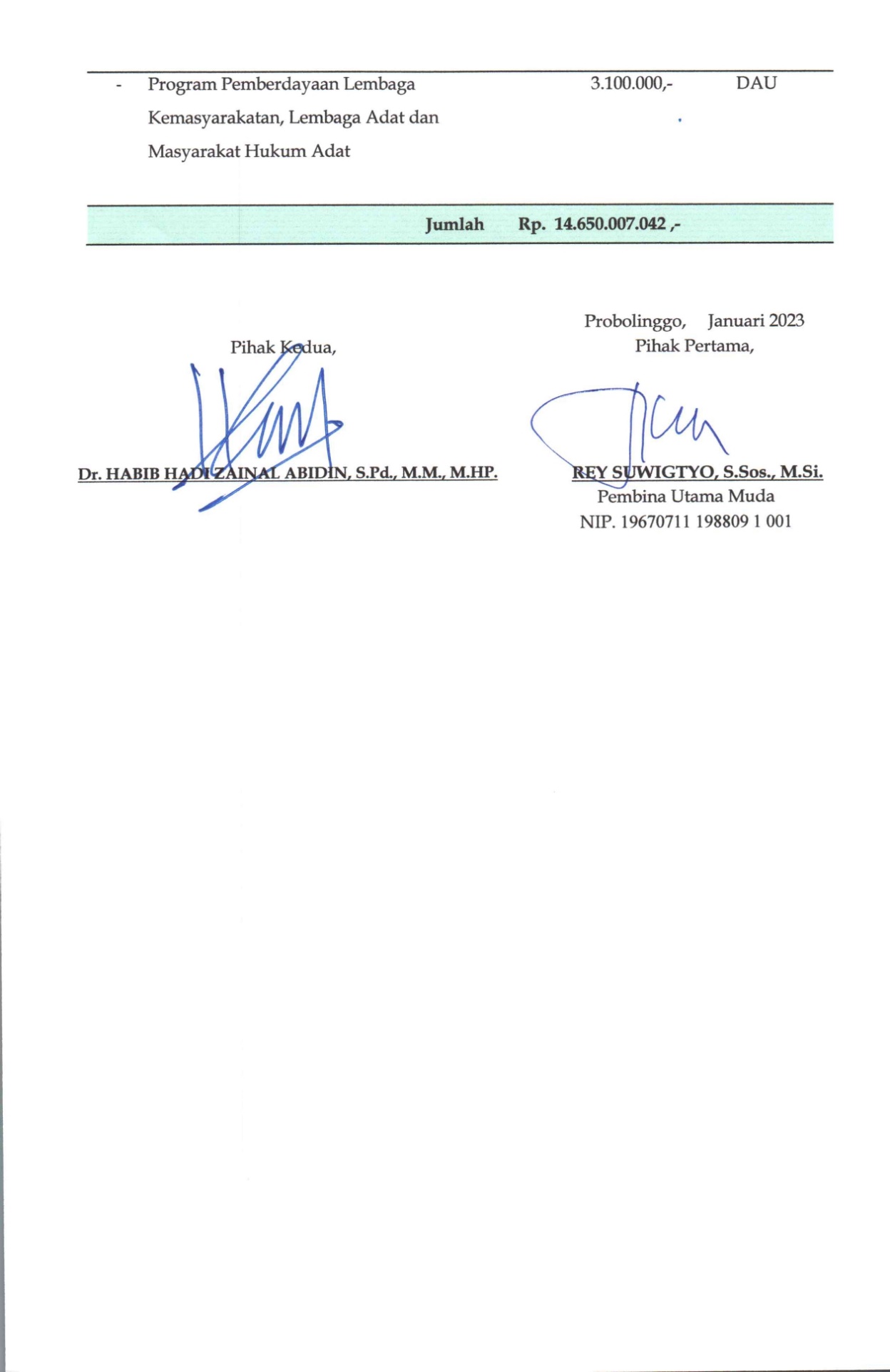
Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

 Kota Probolinggo Tahun 2023





**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Capaian Kinerja** | **Keterangan** |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Lebih dari 89%  60% hingga 80%  40% hingga 60%  20% hingga 40%  Kurang dari 20% | Sangat Baik  Baik  Cukup Kurang  Sangat Kurang |

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2023 , dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

1. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
2. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023;
3. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra;
4. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
5. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
6. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
7. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
8. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
9. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2023, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2023 atau target akhir tahun Renstra 2019-2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.1.A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 89% | 91,18% | 102,45% |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.1.1.B.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | |
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 89% | 80,90% | 91,18% |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.1.C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 90% | 91,18% | 90% |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI TAHUN 2023 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 91,18% | - | - |

1. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | ANGGARAN | PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 8.571.714.179 | **54,09%** |

1. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
| **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 89% | 91,18% | 102,45% | 8.571.714.179 | 6.571.660.985 | 76,67% |

1. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.1.G.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA | PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 91,18% | 76,22% | - |

1. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | Analisa Penyebab |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 89% | 91,18 | **-** |

1. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 89% | 91,18% | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial |
| Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial |
|  |  |  | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** |
|  |  |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|  |  |  | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** |
|  |  |  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota |
|  |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** |
|  |  |  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota |
|  |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** |
|  |  |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
|  |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** |
|  |  |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Utama | Madya | - |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.1.2.B.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | |
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Utama | - | Madya |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Mentor | Madya | - |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI TAHUN 2023 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Madya | - | - |

1. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.2.E.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | ANGGARAN | PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | 331.107.290 | **2,09%** |

1. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.2.F.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
| **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Utama | Madya | Madya | 331.107.290 | 317.397.280 | 95,86% |

1. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 3.1.2.G.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA | PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | - | 95,86% | - |

1. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.2.H.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | Analisa Penyebab |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Utama | Madya | **Terdapat perubahan indikator penilaian APE dan ada penambahan kategori predikat** |

1. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PROGRAM/KEGIATAN |
| Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender | Utama | Madya | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** |
| Pengumpulahan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |

3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.3.A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 100% | 100% |
| Kategori Kota Layak | Utama | Utama | Utama |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.1.3.B.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | |
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | N/A | 100,0% |
| Kategori Kota Layak | Utama | Nindya | Utama |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.3.C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 100,0% | 100% |
| Kategori Kota Layak Anak | Utama | Utama | Nindya |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI TAHUN 2023 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100,0% | - | - |
| Kategori Kota Layak | Utama | - | - |

1. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | ANGGARAN | PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 502.395.000 | **3,17%** |
| Kategori Kota Layak | 263.533.590 | **1,66%** |

1. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
| **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 100,0% | 100% | 502.395.000 | 408.500.400 | 81% |
| Kategori Kota Layak | Utama | Utama | Utama | 263.533.590 | 256.856.280 | 97% |

1. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.G.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA | PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 81% | 81% |
| Kategori Kota Layak | Utama | 97% | 96% |

1. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.3.H.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | Analisa Penyebab |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 100,0% | - |
| Kategori Kota Layak | Utama | Utama | - |

1. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.3.I.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PROGRAM/KEGIATAN |
| Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani | 100% | 100% | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** |
| Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota |
|  | Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|  | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** |
|  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota |
| Kategori Kota Layak | Nindya | Nindya | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK** |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota |

**3.2. Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp 15.847.399.455,- yang dilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2023 adalah Rp 13.279.691.803,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 83,80 %. Secara rinci, realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN** | **PAGU ANGGARAN (P.APBD)** | **REALISASI** | **%** |
| **URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL** | **14.748.713.575** | **12.295.320.293** | **83,37%** |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | **6.178.399.396** | **5.723.659.308** | **92,64%** |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **54.435.590** | **54.245.880** | **99,65%** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.365.000 | 4.364.800 | **100,00%** |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.070.590 | 49.881.080 | **99,62%** |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.172.743.886** | **4.748.818.575** | **91,80%** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.009.870.706 | 4.587.713.895 | **91,57%** |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 93.492.000 | 92.592.000 | **99,04%** |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 69.381.180 | 68.512.680 | **98,75%** |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.129.800** | **1.109.800** | **98,23%** |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.129.800 | 1.109.800 | **98,23%** |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **213.150.010** | **212.819.635** | **99,85%** |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 213.150.010 | 212.819.635 | **99,85%** |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **270.729.910** | **260.831.012** | **96,34%** |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.847.250 | 29.610.100 | **99,21%** |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.031.800 | 9.031.500 | **100,00%** |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.215.000 | 8.215.000 | **100,00%** |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.998.000 | 1.950.000 | **97,60%** |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 | 10.000.000 | **100,00%** |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 163.527.860 | 159.382.200 | **97,46%** |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 48.110.000 | 42.642.212 | **88,63%** |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.519.000** | **40.060.000** | **96,49%** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.519.000 | 40.060.000 | **96,49%** |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **142.464.030** | **137.567.941** | **96,56%** |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.854.030 | 2.851.000 | **99,89%** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103.280.000 | 100.886.941 | **97,68%** |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.330.000 | 21.830.000 | **89,72%** |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12.000.000 | 12.000.000 | **100,00%** |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **282.227.170** | **268.206.465** | **95,03%** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.789.200 | 32.066.064 | **94,90%** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 127.794.970 | 116.310.801 | **91,01%** |
| Pemeliharaan Mebel | 6.900.000 | 6.900.000 | **100,00%** |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 48.725.000 | 48.575.000 | **99,69%** |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 65.018.000 | 64.354.600 | **98,98%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **77.716.590** | **76.800.180** | **98,82%** |
| **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota** | **77.716.590** | **76.800.180** | **98,82%** |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | 7.921.000 | 7.715.100 | **97,40%** |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota | 64.895.590 | 64.730.080 | **99,74%** |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | 3.400.000 | 2.855.000 | **83,97%** |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 1.500.000 | 1.500.000 | **100,00%** |
| **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **935.125.180** | **885.422.865** | **94,68%** |
| **REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL** | **823.275.590** | **776.568.200** | **94,33%** |
| Penyediaan Permakanan | 763.033.590 | 717.253.700 | **94,00%** |
| Penyedian Alat Bantu | 60.242.000 | 59.314.500 | **98,46%** |
| **Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial** | **111.849.590** | **108.854.665** | **97,32%** |
| Penyediaan Permakanan | 21.800.000 | 21.477.800 | **98,52%** |
| Penyediaan Sandang | 90.049.590 | 87.376.865 | **97,03%** |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **7.258.495.319** | **5.322.704.210** | **73,33%** |
| **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **7.258.495.319** | **5.322.704.210** | **73,33%** |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 322.244.780 | 321.790.360 | **99,86%** |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 6.860.469.049 | 4.925.303.870 | **71,79%** |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 75.781.490 | 75.609.980 | **99,77%** |
| **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **201.900.000** | **191.355.250** | **94,78%** |
| **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota** | **201.900.000** | **191.355.250** | **94,78%** |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 201.900.000 | 191.355.250 | **94,78%** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **97.077.090** | **95.378.480** | **98,25%** |
| **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **97.077.090** | **95.378.480** | **98,25%** |
| Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 14.934.000 | **99,56%** |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 13.096.000 | 11.618.000 | **88,71%** |
| Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 68.981.090 | 68.826.480 | **99,78%** |
| **URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.098.685.880** | **984.371.510** | **89,60%** |
| **URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **1.097.285.880** | **983.003.960** | **89,59%** |
| **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **331.107.290** | **317.397.280** | **95,86%** |
| **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **45.620.000** | **42.168.500** | **92,43%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 29.157.500 | 25.857.500 | **88,68%** |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 16.462.500 | 16.311.000 | **99,08%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **285.487.290** | **275.228.780** | **96,41%** |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 17.890.000 | 17.840.000 | **99,72%** |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 267.597.290 | 257.388.780 | **96,19%** |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **192.165.000** | **127.295.900** | **66,24%** |
| **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota** | **51.500.000** | **47.550.000** | **92,33%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 51.500.000 | 47.550.000 | **92,33%** |
| **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **121.515.000** | **60.700.000** | **49,95%** |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 24.000.000 | 24.000.000 | **100,00%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 97.515.000 | 36.700.000 | **37,64%** |
| **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **19.150.000** | **19.045.900** | **99,46%** |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.150.000 | 19.045.900 | **99,46%** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **250.000** | **250.000** | **100,00%** |
| **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **250.000** | **250.000** | **100,00%** |
| Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 250.000 | 250.000 | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **263.533.590** | **256.856.280** | **97,47%** |
| **Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota** | **95.636.000** | **91.982.450** | **96,18%** |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.850.000 | 17.850.000 | **94,69%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 76.786.000 | 74.132.450 | **96,54%** |
| **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota** | **167.897.590** | **164.873.830** | **98,20%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota | 27.500.000 | 27.400.000 | **99,64%** |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 87.012.000 | 85.694.750 | **98,49%** |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota | 53.385.590 | 51.779.080 | **96,99%** |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **310.230.000** | **281.204.500** | **90,64%** |
| **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **58.200.000** | **55.295.000** | **95,01%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 58.200.000 | 55.295.000 | **95,01%** |
| **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota** | **177.434.000** | **154.629.500** | **87,15%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 156.989.000 | 134.394.500 | **85,61%** |
| Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.445.000 | 20.235.000 | **98,97%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota** | **74.596.000** | **71.280.000** | **95,55%** |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 74.596.000 | 71.280.000 | **95,55%** |
| **URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **1.400.000** | **1.367.550** | **97,68%** |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **1.400.000** | **1.367.550** | **97,68%** |
| **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.400.000** | **1.367.550** | **97,68%** |
| Fasilitasi Bulahan Bakti Gotong Royong Masyarakat | 1.400.000 | 1.367.550 | **97,68%** |
| **TOTAL JUMLAH** | **15.847.399.455** | **13.279.691.803** | **83,80%** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategi tahun 2019-2024.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2023. Namun terdapat satu indikator yang belum mencapai realisasi yaitu pada indikator “Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan indikator penilaian APE dan adanya penambahan kategori predikat. Dengan realisasi anggaran 2023 sebesar 83,80%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.

**4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja**

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik. Selain itu pentingnya mencermati aturan-aturan pengganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2023 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan indikator kinerja pada setiap sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 5889 Tahun 2021.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat